

MENUJU IKN: PENGEMBANGAN PARIWISATA BERPERSPEKTIF KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Varinia Pura Damaiyanti¹, Arif Rahman Hakim², Khairussalam³

¹*Universitas Lambung Mangkurat, varinia.damaiyanti@ulm.ac.id*

²*Universitas Lambung Mangkurat, arif.rh@ulm.ac.id*

³*Universitas Lambung Mangkurat, khairusalam@ulm.ac.id*

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke daerah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah bukan sekedar wacana belaka, tetapi sudah direalisasikan dengan ditentukannya lokasi Titik Nol Ibukota Negara (IKN) dan sejumlah persiapan pembangunan sudah dilakukan. Pembangunan IKN ini tentunya berdampak pada banyak sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pariwisata. Adanya pembangunan IKN tentunya membawa dampak bagi pengembangan pariwisata di Pulau Kalimantan, tidak hanya Provinsi Kalimantan timur, tetapi provinsi Kalimantan lainnya. Hanya saja, wacana pembangunan IKN dan pengembangan pariwisata yang selama ini digaungkan, minim mengulik pengembangan pariwisata yang berbasis pada keadilan bagi penyandang disabilitas. Persoalan penyandang disabilitas yang selama ini menjadi perhatian adalah pada persoalan pemberdayaan, tetapi bagaimana pengembangan pariwisata yang ramah pada penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menikmati pariwisata secara maksimal seakan terabaikan dan tidak menjadi fokus perhatian pada pengembangan pariwisata. Tulisan ini berupaya untuk mengangkat dan mengingatkan agar pembangunan IKN beserta pengembangan pariwisatanya tidak lantas abai pada kaum minoritas, khususnya penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Pembangunan; IKN; Pengembangan Pariwisata; Penyandang Disabilitas*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur membawa implikasi pada berbagai sektor, antara lain ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan pariwisata. Hal ini tentunya dapat dilihat sebagai sesuatu yang baik dalam konsep pemerataan pembangunan, jika selama ini pembangunan dipandang sebagai 'Jawasentris' karena Ibu Kota berada di Pulau Jawa, maka pemindahan IKN ini sedikit demi sedikit akan mengeliminir pandangan Jawasentris tersebut. Perihal pengembangan pariwisata, pihak pemerintah daerah maupun penduduk lokal tentunya perlu menyambut baik dan bersinergi dalam pengembangan pariwisata ini. Tidak dapat dipungkiri dengan pemindahan ibu kota negara, maka jumlah pendatang akan meningkat dan sektor pariwisata perlu dilakukan pengembangan karena bidang pariwisata ini merupakan salah satu bidang yang dapat menghasilkan devisa cukup besar serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan pariwisata, yang dewasa ini sering pula disebut dengan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan dan penduduk asli daerah setempat atau penduduk lokal, penting juga untuk memperhatikan kelompok minoritas yaitu penyandang disabilitas. Pariwisata yang memiliki perspektif ramah pada penyandang disabilitas adalah pariwisata yang mampu memberikan berbagai kebutuhan bagi para penyandang disabilitas, seperti atraksi, aksesibilitas, informasi, dan transportasi (Asmaradana, dkk, 2019).

Hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pariwisata itu ada beberapa aspek di antaranya yaitu Informasi (Agovino, dkk., 2017), Sarana dan prasarana (Kurniawan & Susilowati, 2016), dan aksesibilitas (Ozturk, dkk, 2008). Artinya, dalam konsep pengembangan pariwisata perlu memikirkan tentang konsep keadilan bagi penyandang disabilitas, sekalipun mereka adalah kelompok minoritas. Hal ini sebetulnya tercantum dalam salah satu Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu tentang Kota dan Permukiman dengan target yaitu tersedianya ruang publik dan ruang terbuka hijau yang mudah di jangkau, inklusif dan aman salah satunya bagi penyandang disabilitas pada tahun 2030.

Pemahaman dalam mengembangkan pariwisata di lapangan adalah penting untuk mengembangkan konsep aksesibilitas yang diberikan dalam perspektif kesetaraan kepada wisatawan dengan memperhatikan aspek disabilitas. Sektor-sektor yang harus menjadi fokus dalam pengembangan pariwisata adalah aksesibilitas, misalnya transportasi, akomodasi, dan atraksi (Darcy S., dkk, 2020).

Pada masyarakat yang terus mengalami perkembangan serta perubahan sosial, status pariwisata berubah dari yang diinginkan secara sosial menjadi kebutuhan. Demikian pula bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik dan lainnya. (Massimiliano A., dkk, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata adalah milik semua orang, para penyandang disabilitas berhak untuk dapat menikmati pariwisata selayaknya non-disabilitas, dan pemerintah wajib menjamin hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berupaya untuk ‘mengingat’ baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seiring dengan pembangunan IKN dan pengembangan pariwisata yang mengikutinya, penting kiranya untuk tidak abai pada kebutuhan penyandang disabilitas akan kehadiran destinasi pariwisata yang ramah dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Tulisan ini juga akan mengambil beberapa contoh destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah yang berada di pulau yang sama dengan lokasi IKN nantinya

2. METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, dalam hal ini metode kualitatif melihat bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai. Penekanan bahwa pemahaman akan penelitian sebagai proses interaktif yang dibentuk oleh *personal history*, biografi, gender, kelas sosial, ras, etnisitas, dan oleh orang-orang yang berada dalam setting situasi di sekitar (Denzin dan Lincoln, 2000; 6). Pada tulisan ini, pengalaman pribadi seorang penyandang disabilitas dalam memandang persoalan pengembangan pariwisata menjadi penting.

Adapun metode kualitatif dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk keperluan (Moleong, 2006; 7) antara lain: *Pertama*, Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang; *Kedua*, Untuk memahami isu-isu yang sensitif; *Ketiga*, Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif; *Keempat*, Digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam.

Informan pada penelitian ini adalah para penyandang disabilitas sejumlah 6 orang dengan metode pengumpulan data adalah menggunakan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan

dengan menanyakan pertanyaan terkait pengalaman pribadi penyandang disabilitas dalam mengakses destinasi wisata terkait fasilitas, aksesibilitas (informasi dan lokasi), serta atraksi.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

3.2. Fasilitas

Para penyandang disabilitas merasakan bahwa selama ini fasilitas yang tersedia di beberapa destinasi wisata kurang ramah dengan penyandang disabilitas. Misalnya pada destinasi wisata ada beberapa tempat yang tidak ramah pada pengguna kursi roda karena harus melewati undakan bertangga. Selain itu fasilitas seperti toilet umum yang tersedia di destinasi wisata juga dirasakan masih tidak ramah dengan penyandang disabilitas.

3.3. Aksesibilitas

Dalam hal aksesibilitas, terkait dua aspek, yaitu aksesibilitas informasi dan aksesibilitas lokasi. Para penyandang disabilitas merasa bahwa dalam hal akses informasi mereka tidak mengalami kendala dan tidak merasakan kesulitan, hal ini dikarenakan teknologi informasi sudah semakin berkembang dan informasi mengenai destinasi wisata dapat dengan mudah mereka akses atau dapatkan. Akan tetapi, persoalan mengenai informasi ini terjadi justru di lokasi destinasi wisata. Keterbatasan informasi yang disampaikan di destinasi wisata juga dirasakan oleh penyandang disabilitas. Misalnya, informasi yang ada di lokasi destinasi wisata umumnya masih informasi tertulis, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas tunanetra untuk mengakses informasi secara mandiri. Aspek selanjutnya adalah aksesibilitas lokasi, para penyandang disabilitas umumnya mengeluhkan destinasi wisata yang harus mendaki sehingga dirasakan tidak ramah pada penyandang disabilitas.

3.4. Atraksi

Persoalan atraksi pada destinasi wisata pada dasarnya tidak terlalu menjadi hal yang dipermasalahan, karena para penyandang disabilitas berupaya memahami kondisi masing-masing destinasi wisata yang tidak memungkinkan melakukan atraksi. Para penyandang disabilitas cenderung mempunyai cara sendiri untuk menikmati destinasi wisata, misalnya pada tunanetra, ketika mereka tidak dapat menyaksikan atraksi, mereka cukup mendengar cerita dan menikmati suasana seperti udara dan kehangatan di sekitar mereka.

4. KESIMPULAN

Pemindahan dan pembangunan IKN perlu kita sambut dengan baik, karena hal ini dapat membawa dampak positif bagi wilayah IKN dan sekitarnya, yaitu pulau Kalimantan. Jika selama ini pembangunan dirasa timpang, maka pemindahan IKN ini menjadi angin segar bagi pemerataan pembangunan, khususnya pengembangan pariwisata. Hal ini perlu untuk terus dikawal agar pengembangan pariwisata dapat mengindahkan prinsip keadilan bagi kelompok minoritas, khususnya penyandang disabilitas. Untuk itu, komitmen kuat dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi pihak swasta dan masyarakat secara umum sangat diperlukan demi terciptanya pengembangan pariwisata yang berperspektif keadilan bagi penyandang disabilitas.

REFERENSI

- Agovino, M., Casaccia, M., Garofalo, A., & Marchesano, K. 2017. *Tourism and Disability In Italy. Limits and Opportunities*, *Tourism Management Perspectives*. (Elsevier Science Ltd. Vol 23. Napoli. Page 58–67).
- Asmaradana, A., Sakinah, N., & Sari, P. 2019. *Revitalisasi Wisata Halal Dan Pemberdayaan Difabelpreneur Berbasis Iot Menuju Indonesia Berdikari. Studi Kasus Wisata Ciwidey. Jawa Barat; Universitas Gunadarma Depok.*
- Darcy S., McKercher, B., Schweinsberg, S. 2020. *From Tourism and Disability to Accessibility Tourism: A Perspective Article*. (*Tourism Review* Vol. 75 No. 1, pp. 140 – 144).
- Denzin, Norman K. Dan Yvonna S. Lincoln. 2000. *Handbook of Qualitative Research (Second Edition)*. London; Sage Publication.
- Kurniawan, E., & Susilowati, F. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas di Ruang Publik di Kota Surabaya*. (*Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Vol 3 No 4. Oktober 2016.*) .
- Massimiliano Agovino, Mariaconcetta Casaccia, Antonio Garofalo, Katia Marchesano. 2017. *Tourism and Disability in Italy. Limits and Opportunities*. (*Tourism Management Perspectives, Volume 23, Pages 58-67*).
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Rosdakarya.
- Ozturk, Y., Yayli, A., dan Yesiltas, M. 2008. *Is The Turkish Tourism Industry Ready For A Disabled Customer's Market? The Views Of Hotel And Travel Agency Managers*, *Tourism Management*. (Elsevier. Ankara. Vol 29No (2), March 2007. Page 382–389).